



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

PENYUSUNAN STANDARISASI FORM IDENTIFIKASI KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG

**NAMA: BUDIYONO, SE, M.Si
NIP. : 19700917 199603 1 003
N D H : 05**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

ABSTRAK

Budiyono (Peserta Diklat PIM IV) ; judul Proyek Perubahan “ Penyusunan Form Standarisasi Identifikasi Kerusakan Bangunan Gedung”.

Abstrak secara alamiah tidak ada benda yang dibuat oleh manusia yang tidak bisa rusak, tetapi usia kegunaannya dapat diperpanjang dengan melakukan perbaikan secara berkala melalui aktivitas yang dikenal sebagai pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga aset, atau memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang bisa diterima dengan merujuk pada standar yang ditentukan oleh organisasi yang melakukan pemeliharaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pemeliharaan komponen arsitektur dan komponen struktur terhadap kualitas pemeliharaan bangunan gedung kantor pusat Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang merupakan perubahan pertama dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Pada Pasal 129 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Sarana dan Prasarana Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, memiliki tugas melakukan perencanaan kebutuhan, pengadaan, perawatan sarana dan prasarana perkantoran, pemeliharaan bangunan gedung di lingkungan kantor pusat, yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka No.7 Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya agar pemeliharaan bangunan gedung di lingkungan kantor pusat Kemendagri dapat berjalan optimal, kondisi ideal yang diharapkan antara lain adalah minimnya laporan kerusakan dan permintaan perbaikan dari pengguna prasarana bangunan gedung, pemeriksaan kondisi bangunan gedung dilakukan secara rutin dan berkelanjutan serta perlu adanya panduan ASN yang bertugas untuk pemelihara bangunan gedung sehingga diharapkan ASN tersebut dapat mengetahui, menangani kerusakan secara dini tanpa diminta oleh pengguna/pimpinan, disisi lain mampu menginformasikannya kebutuhan perbaikan dan rehabilitasi secara cepat.

Pemeliharaan bangunan gedung pada kantor pusat Kementerian Dalam Negeri yang berjalan selama ini dirasakan belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah belum adanya Instrumen yang baku dalam melakukan identifikasi kerusakan bangunan gedung, masih terdapat laporan kerusakan yang disampaikan secara langsung oleh pengguna fasilitas, adanya kesulitan dalam melakukan memonitor kondisi bangunan gedung dan pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi/renovasi yang dilaksanakan masih berdasarkan permintaan dan arahan pimpinan;

Untuk selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung diperlukan pemilihan suatu sistem yang tepat sehingga kegiatan pemeliharaan bangunan gedung dapat berjalan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat standarisasi form identifikasi kerusakan bangunan gedung, dimana instrumen tersebut diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan dalam kegiatan pemeliharaan bangunan gedung yang belum optimal.